

BAB V

PEMBAHASAN

Pembahasan di sini termasuk di dalamnya analisis data. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa di Indonesia, keterlibatan perempuan di pondok pesantren sudah ada sejak tahun 1910. Pada tahun itu telah didirikan pondok pesantren khusus perempuan yang mengharuskan adanya campur tangan para perempuan dalam pengelolaan pondok pesantren perempuan tersebut. Sejarah mencatat bahwa berhasilnya didirikan pondok pesantren perempuan di Indonesia tidak lepas dari prakarsa peranan gerakan para perempuan muslim di Indonesia.

Di daerah Jawa seperti Nyai Dahlan yang mendirikan Aisyiah organisasi perempuan Muhammadiyah dan kemudian berhasil membuka sekolah asrama khusus anak perempuan. Selain itu juga ada Nyai Khairiyah aktivis dari Muslimat NU yang mendirikan Pesantren Perempuan di Seblak serta mendirikan Madrasah Lil Banat di Makkah. Di Sumatera Barat juga ada Rahmah El Yunusiah yang juga mendirikan Madrasah “Diniyah Li al-Banat” di Padang Panjang.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pondok pesantren pada awalnya hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Oleh karena itu pondok pesantren ini identik dengan para laki-laki yaitu kyai, ustadz, dan santri, bahkan ada asumsi masyarakat bahwa pondok pesantren itu kepunyaan laki-laki. Asumsi tersebut sangat beralasan, diantaranya karena kyai lah yang memelopori berdirinya pondok pesantren, masyarakat sangat meyakini bahwa kyai sebagai kunci

kemajuan sebuah pondok pesantren dan kyai juga merupakan komponen pondok pesantren yang paling utama.

Pada awal abad 20 tepatnya di daerah Jawa mulai disediakan pondok pesantren untuk menampung para perempuan belajar ilmu agama Islam. Sebelumnya para perempuan hanya belajar melalui lembaga pengajian informal saja dan hanya terbatas pada pembelajaran kitab-kitab Islam klasik tingkat dasar. Sedangkan untuk tingkat tinggi hanya didapat oleh para puteri kyai, karena kyai tersebut yang mengajarkannya langsung.

Sebagaimana yang dijelaskan Dhofier bahwa K.H. Hasyim Asy'ari mengajarkan langsung berbagai cabang pengetahuan Islam kepada puterinya yang bernama Nyai Khairiyah.¹ Para perempuan dari keluarga kyai inilah yang kemudian banyak berperan dalam pendirian pondok pesantren perempuan dan pengelolaannya. Walaupun pada awal mulanya pendirian pondok pesantren perempuan ini masih dipelopori oleh kyai, namun alasan terbesar mereka membangun pondok pesantren perempuan ini tentunya untuk memfasilitasi saudari-saudari dan anak-anak perempuan mereka yang ingin belajar agama Islam.

Setelah banyak diantara para perempuan tersebut lulus dari pondok pesantren dan ada sebagian mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hingga perguruan tinggi, dan kemudian mereka membagikan ilmu yang mereka miliki kepada kaum perempuan lain dengan mendirikan lembaga-

¹Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, h. 54.

lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren, madrasah, dan sekolah asrama.

Jika dilihat dari tokoh-tokoh perempuan muslim yang berhasil dalam mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan Islam untuk perempuan, mayoritas mereka dari kalangan elit muslim seperti dari kalangan keluarga kyai, pemuka agama, dan tokoh organisasi Islam. Jadi status sosial keluarga sangat berpengaruh dan memberikan peluang para perempuan untuk mendapatkan kebebasan bergerak di luar peranan domestik.

Seperti Nyai Dahlan, nama lengkap beliau adalah Siti Walidah, selain istri dari tokoh pendiri organisasi Islam Muhammadiyah beliau merupakan puteri dari penghulu Keraton yang cukup terpendang di Kauman yaitu Kyai Penghulu H. Muhammad Fadil.²Nyai Khairiyah yang juga dari keluarga kyai atau tepatnya anak dari Kyai Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh pendiri pesantren Tebuireng. Dan Syekhah Rahmah El-Yunusiah dari Padang Panjang, beliau berasal dari keluarga ulama. Ayah beliau adalah Syekh Muhammad Yunus.³

Kemasyhuran keluarga memberikan jalan para tokoh perempuan ini untuk eksis di ranah publik. Mereka memanfaatkan keadaan itu dengan baik dan pihak keluarga juga memberikan dukungan sepenuhnya, serta siap membantu baik itu berupa sumbangan materi, tenaga, maupun pikiran. Adanya pengetahuan keagamaan yang tinggi, tekad dan kemauan yang kuat serta dukungan dari keluarga adalah modal utama para perempuan dalam menjalankan peranan publik mereka.

²Farah Frastia, Siti Walidah..., h. 118.

³Nazaruddin, Rahmah El-Yunusiah..., h. 148.

A. Peranan Publik Perempuan di Pondok Pesantren Puteri

Peranan publik perempuan didefinisikan sebagai peranan perempuan dalam masyarakat, baik dalam rangka mencari nafkah, maupun untuk aktualisasi diri dalam berbagai aspek kehidupan: sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dakwah dan lain sebagainya.⁴

Peranan publik ini merupakan bagian dari peranan sosial yang dimiliki perempuan, jadi para perempuan pada dasarnya berhak memiliki peranan sosial yang terdiri dari peranan domestik dan peranan publik. Peranan domestik adalah peranan perempuan yang ruang lingkungannya di rumah tangga, dan peranan publik adalah peranan perempuan di ruang lingkup kemasyarakatan, seperti sebagai guru, pedagang, petani, dan lain sebagainya.

Peranan publik perempuan di pondok pesantren-pun ada yang sifatnya masih terbatas pada ranah domestik dan ada sifatnya berperan dalam bentuk memberikan pemikiran-pemikiran keilmuan. Berperan dalam ranah domestik pondok seperti mengurus kebutuhan sandang dan pangan para santri di pondok/asrama (mengurus keperluan rumah tangga pondok). Sedangkan peranan dalam bentuk memberikan pemikiran-pemikiran keilmuan, seperti perempuan sebagai pemimpin, pendidik, dan perumus kurikulum pondok, serta pengasuh pondok/asrama, yang semua ini memerlukan pemikiran-pemikiran keilmuan dalam pelaksanaannya, dan tidak semua perempuan mampu memainkan peranan ini, tentunya hanya perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi saja yang mampu menjalankannya.

⁴M. Hadi Masruri "Peran Sosial Perempuan...h. 35

Peranan perempuan dalam bentuk memberikan pemikiran-pemikiran keilmuan di sini akan diuraikan lagi menjadi beberapa kategori yaitu: 1) peranan perempuan dalam pendidikan, 2) peranan perempuan dalam keagamaan, 3) peranan perempuan dalam managerial dan kepemimpinan, 4) peranan perempuan dalam perekonomian, 5) peranan perempuan dalam politik.

1. Peranan Perempuan dalam Pendidikan

Peranan perempuan di bidang pendidikan sejak zaman awal Islam yaitu pada masa nabi Muhammad dan Khulafa` Rasyidin sudah ada. Yaitu diperankan dan dilakukan oleh istri nabi sendiri Siti Aisyah RA, yang terkenal kecerdasannya dan jasanya dalam meriwayatkan beberapa hadis.⁵

Para perempuan di pondok pesantren sangat jelas peranan yang mereka lakukan di bidang pendidikan. Seperti mendidik dan membimbing para santriatinya menjadi manusia yang baik dalam bertingkah-laku dan berkepribadian. Juga mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan berupa pengajaran kitab-kitab keagamaan atau kitab kuning kepada para santriatinya.

Adapun para perempuan di Kalimantan Selatan mulai diikutsertakan sebagai pendidik di pondok pesantren puteri sejak tahun 1952. Yaitu ketika Pondok Pesantren Normal Islam Puteri/Rasyidiyah Khalidiyah Puteri Amuntai berhasil meluluskan alumni pertamanya pada tahun 1951 sebanyak 8 orang yang kemudian sebagian besar dari mereka ini diminta untuk ikut mengajar di pondok pesantren puteri Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai.

⁵Muhammad Al-Jamal, *Malikah At-Thuhur Aisyah...*, h. 61-62.

Selanjutnya pondok pesantren yang membuka peluang peranan publik untuk kaum perempuan sebagai pengajar adalah Pondok Pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru. Pondok pesantren puteri ini sejak berdirinya pada tahun 1984 sudah melibatkan peranan perempuan dalam skala besar. Setelah itu baru di susul oleh Diniyah Awwaliyah Puteri di Pondok Pesantren Darussalam Martapura pada tahun 1987.

Di pondok pesantren ini para perempuan terlibat dalam perkembangan wacana sosial-keagamaan dan sosial-intelektual Islam melalui pengajaran kitab-kitab keagamaan atau lebih dikenal dengan istilah kitab kuning yang merupakan kurikulum khas pondok pesantren.

Mata pelajaran dan kitab yang diajarkan di tingkat Diniyah Awwaliyah Puteri Pondok Pesantren Darussalam Martapura diantaranya meliputi; Tauhid dengan kitab yang diajarkan adalah *Risâlah Al-Tauhid* karya H. Muhammad Kasyful Anwar, Fiqh dengan kitab *Risâlah Al-Fiqhihiyyah* karya H. Muhammad Kasyful Anwar, Ad'iyah dengan kitab *Al-Ad'iyah wa Al-Adzkar* karya H. Abidillah, Al-Qur'an dengan kitab *Juz Amma*, dan Tajwid dengan kitab *Tajwid Melayu* karya H. Muhammad Kasyful Anwar.

Adapun pelajaran agama yang diajarkan oleh para perempuan tersebut pada Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Puteri Amuntai diantaranya adalah; Alquran/Tajwid, Tarjemah, Hadits, Tauhid/Diniyah, Fiqh, Ushul Fiqh, Tafsir, Mushthalahul hadits, Tarikh Islam, dan Tarikh Tasyri'. Sedangkan untuk mata pelajaran B.Arab meliputi; Muthala'ah, Lughah/Insya, Mahfuzhat, Sharaf, Khath, Imla, Nahwu/Qawaid, Balaghah, dan Adabul lughah.

Sedangkan mata pelajaran dan kitab yang diajarkan di Pondok Pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru diantaranya adalah; Alquran dengan kitab *Tahfidz Alquran wa al-Tajwid*, Nahwu dengan kitab *Al-Kawâkib Al-Duriyyah* dan *Qathru Al-Nada'*, Insya dengan kitab *Al-Nahwu Al-Wâdhih*, Balaghah dengan kitab *Al-Balâghah Al-Wâdhihah*, Tafsir dengan kitab *Al-Jalalain*, Hadits dengan kitab *Jawâhir Al-Bukhâri*, Fiqh dengan kitab *Iâ'nat Al-Thâlibîn*.

Kitab keagamaan atau kitab kuning merupakan salah satu elemen sebuah pondok pesantren, sebagaimana Dhofier menyebutkan lima elemen sebuah pesantren yaitu pondok, masjid, kitab kuning/klasik, santri, dan kyai sebagai kunci kemajuan pesantren.⁶ Sekarang sudah banyak para perempuan di pondok pesantren yang mampu menguasai kitab-kitab keagamaan oleh karena itu perlu adanya revisi/pembaharuan tentang elemen pondok pesantren di atas berupa penambahan nyai/ustadzah/guru perempuan sebagai kunci kemajuan pondok pesantren.

Lebih besarnya peranan laki-laki daripada perempuan di pondok pesantren tidak menjadikan ini sebuah persaingan antar mereka. Hal ini sudah membudaya dan merupakan suatu yang natural/lumrah saja. Kaum perempuan di pondok pesantren kebanyakannya tidak ingin berkuasa penuh dalam kehidupan sosial.

Para perempuan pondok pesantren hanya ingin menjalankan fungsi sosial mereka dan mencari keseimbangan dan keharmonisan hidup. Lebih memilih mengutamakan peranan domestik mereka, bahasa sederhananya “lebih baik tidak mengambil peranan besar (misal sebagai pemimpin pesantren) daripada peranan di rumah tangga akan terbengkalai”.

⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, h. 44.

Fenomena ini sesuai dengan teori struktur-fungsional, yaitu berkenaan dengan masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang berkaitan (agama, pendidikan, struktur publik, dan rumah tangga). Teori ini memandang bahwa laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari struktur nilai dalam kehidupan masyarakat. Masing-masing bagian secara terus-menerus mencari keseimbangan dan keharmonisan.

Sebagaimana yang dijelaskan M. Dimiyati Huda bahwa harmoni dan stabilitas suatu masyarakat, menurut teori struktural fungsional sangat ditentukan oleh konsensus nilai-nilai. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu dengan yang lain, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Teori ini mencoba menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan suatu keseimbangan dalam suatu masyarakat.⁷

Sejak kaum perempuan telah diikutsertakan sebagai pengajar di pondok pesantren dari tahun 1952 sampai sekarang, tentunya dengan peranan mereka sebagai pendidik dan pengajar kitab-kitab keagamaan, maka terlihat ada peranan dan kontribusi mereka dalam kemajuan pondok pesantren puteri di Kalimantan Selatan, sebagai berikut.

a. Terlibat dalam Perkembangan Wacana Sosial-Keagamaan dan Sosial-Intelektual Islam

⁷ M. Dimiyati Huda, *Rethinking Peran...*, h. 30-31.

Sosial-keagamaan adalah perbuatan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sosial dan ajaran agama yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan sungguh-sungguh serta diimplementasikan di lingkungan sosial masyarakat. Seperti berakhlak mulia, sopan-santun, tolong-menolong, dan selalu memperhatikan kehidupan spiritualitasnya.

Sosial-keagamaan juga merupakan posisi, kedudukan, dan status seseorang dalam sebuah kehidupan sosial keberagamaan. Kedalaman ilmu agama seseorang sangat mempengaruhi sosial-keagamaannya. Dan akan diberikan kepercayaan oleh masyarakat, seperti para ulama yang ketika sudah diberikan gelar keulamaan, maka sudah pasti memiliki tempat dalam sosial-keagamaan.

Adapun sosial-intelektual Islam adalah seluruh aktivitas keilmuan yang berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai atau karakter Islam pada seseorang. Kata intelektual itu sendiri adalah kecerdasan, berakal berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi intelektual Islam mencakup para ulama/ilmuwan yang memiliki keahlian terhadap ilmu-ilmu keagamaan, proses pertumbuhannya, lembaga-lembaga yang mendukung terselenggaranya aktivitas pengajian ilmu agama tersebut.

Jajat Burhanudin dalam pengantar editor buku berjudul "*Ulama Perempuan Indonesia*" menjelaskan bahwa kata "ulama" masih dominan dipahami masyarakat sebagai laki-laki yang secara sosial-keagamaan menguasai kitab kuning dan memimpin pondok pesantren.⁸

⁸Jajat Burhanudin, ed. *Ulama Perempuan...*, h. vii.

Kemudian seiring berjalannya waktu, muncul istilah ulama perempuan yang menambah wacana sosial-keagamaan. Indikator keulamaannya tidak terbatas hanya dalam penguasaan kitab kuning dan pemimpin pondok pesantren, tetapi indikatornya sangat bervariasi, yaitu segala aktivitas perempuan yang berjasa dalam dinamika kehidupan muslim Indonesia.

Seperti aktivitas para perempuan di pondok pesantren, baik sebagai pendidik dan pengasuh asrama, pengajar kitab kuning, pemimpin/pengelola, pendakwah dan lain sebagainya. Hal ini secara langsung para perempuan pondok pesantren ini juga ikut mengembangkan sosial-intelektual Islam dan akhirnya memberi kontribusi bagi perkembangan Islam di Indonesia. Salah satunya melalui pengajaran kitab-kitab keagamaan atau lebih dikenal dengan istilah kitab kuning yang merupakan kurikulum khas pondok pesantren.

b. Terlibat dalam Pelestarian Budaya Pondok Pesantren

Pandai dalam penguasaan kitab-kitab keagamaan merupakan daya saing yang dipertahankan oleh pondok pesantren, yang tidak bisa didapat di lembaga pendidikan lain. Oleh karena itu para perempuan ini juga ikut menjaga, mempertahankan, dan melestarikan daya saing yang menjadi ciri khas pondok pesantren.

Penguasaan kitab-kitab keagamaan atau biasa disebut dengan kitab kuning merupakan kurikulum pondok pesantren. Kitab kuning merupakan ciri khas pondok pesantren sejak dahulu sampai sekarang. Sehingga telah

menjadi budaya di pondok pesantren. Di sini para perempuan juga ikut mengajarkan kitab-kitab tersebut, jadi mereka secara langsung telah ikut menjaga kelestarian budaya pondok pesantren.

c. Ulama Perempuan dan Pencetak Kader Ulama Perempuan

Persyaratan untuk menjadi ulama di antaranya: menguasai ilmu-ilmu agama, wacana Islam klasik, dengan penguasaan sumber-sumber Islam klasik yang sangat meyakinkan sesuai dengan standar yang berlaku, yang mengemban misi kenabian yakni menegakkan keadilan dan kemanusiaan, serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan pantas untuk disebut pewaris para nabi.⁹

Kemudian Husein Muhammad juga memaparkan tentang tugas-tugas utama ulama perempuan, diantaranya: Bersama laki-laki mengembangkan interpretasi dua sumber agama Islam untuk menghasilkan fatwa-fatwa, menegakkan keadilan, menghapus beranekaragam diskriminasi, serta aktif dalam menyuarakan toleransi, moderasi, dan anti kekerasan.¹⁰

Adapun fokus ulama perempuan di pondok pesantren ini yaitu ulama perempuan yang berkecimpung di dunia pondok pesantren dan menggeluti kitab-kitab keagamaan/kitab kuning. Mereka berhasil mencetak *output* (santri lulusan) berupa kader-kader ulama perempuan dengan kemampuan penguasaan kitab-kitab keagamaan. Bahkan diantara mereka berhasil mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti

⁹Helmi Ali Yafie, ed. *Jejak Perjuangan Keulamaan...*, h. xxix.

¹⁰Husein Muhammad, *Perempuan Ulama...*, h. 18.

pondok pesantren, majelis taklim, dan taman pendidikan Alquran. Inilah salah satu indikator yang menjadikan para perempuan pondok pesantren puteri di Kalimantan Selatan ini berhak diberikan gelar ulama perempuan.

d. *Role Model* (Teladan) bagi Santriwati

Role Model merupakan seseorang yang menjadi tokoh, yang dicontoh segala perilakunya, dan menjadi teladan bagi orang sekitar. *Role model* ini bisa diperankan oleh pemimpin dan pendidik, serta ulama. Jika di pondok pesantren puteri, maka yang *role model* bagi para santriatinya adalah para ustadzah baik yang mengajar maupun pengasuh dan pemimpinnya.

Jadi para perempuan pondok pesantren puteri di Kalimantan Selatan ini sebagai pemberi teladan yang baik yang kerap dicontoh oleh santri puterinya. Misal: sebagian besar pengajar perempuan di pondok pesantren ini memiliki pengajian atau majelis taklim, hal ini telah banyak dicontoh oleh santri puteri lulusan, bahwa mereka juga memiliki pengajian setelah mereka lulus.

Di pondok pesantren puteri, peranan para guru perempuan sangatlah penting. Karena secara biologis antara santriatu dan guru perempuan itu sama. Sehingga ketika santriatu ingin bertanya atau mengutarakan sesuatu itu tidak malu-malu lagi dan lebih nyaman. Seperti bertanya tentang haid, nifas, bersuci dan lain sebagainya.

Pendekatan yang perempuan gunakan pun sangat berpengaruh ketika membimbing dan mengarahkan santriatinya dengan menonjolkan ciri khas sifat *feminin* yang mereka miliki. Seperti lemah-lembut, lebih perhatian, peduli, peka terhadap keadaan santriatinya, serta lebih demokratis.¹¹ Karena para perempuan ini selama di pondok pesantren berperan menjadi ibu simbolik bagi para santriatinya, mereka pengganti sementara peran orang tua. Hal ini tentunya menjadikan peranan perempuan di pondok pesantren puteri lebih dibutuhkan oleh para santriatinya.

2. Peranan Perempuan dalam Keagamaan

Dalam kitab *Tarikh al- Thabari* dan *Thabaqat Ibn Sa'ad* disebutkan bahwa perempuan pada masa awal Islam berperan aktif dalam kegiatan keagamaan. Para perempuan itu turut serta berbai'at kepada nabi Muhammad dan berhijrah ke Madinah bersama kaum Muhajirin. Mereka mendatangi masjid, berperan dalam ibadah-ibadah keagamaan, hari-hari besar Islam dan mendengarkan ceramah-ceramah nabi Muhammad Saw.¹²

Begitu juga dengan para guru perempuan di pondok pesantren puteri yang ada di Kalimantan Selatan, mereka turut menjalankan perannya sebagai pemuka-pemuka agama dengan penguasaan kitab-kitab keagamaan, baik bagi santriatinya di pondok pesantren maupun di tengah-tengah masyarakat di luar pondok pesantren.

¹¹Ambarwati dan Aida Husna "Manajemen Pesantren Responsif Gender...", h. 453-454.

¹²Abd al-Halim Muhammad Abu Syaqqah,. *Tahrir al-Mar'ah...*, h. 88.

Sebagai orang yang memiliki peranan *religius* yaitu penyampai ajaran agama kepada masyarakat dan peranan sosial sebagai panutan masyarakat sekitarnya, maka para perempuan pondok pesantren merasa memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan misi-misi aqidah Islam.

Para perempuan pondok pesantren ini ada yang mengadakan pengajian rutin bersama-sama masyarakat. Ada yang di minta masyarakat untuk menyampaikan ceramah keagamaan, dan ada juga sekedar membacakan sebuah kitab di acara pengajian khusus perempuan.

Dengan adanya majelis-majelis taklim dan pengajian yang mereka dirikan dan mereka pimpin, hal ini secara langsung para perempuan pondok pesantren ini juga memunculkan wadah/tempat bagi para masyarakat luas khususnya para perempuan untuk mendapatkan ilmu keagamaan. Dengan demikian para perempuan pondok pesantren puteri ini berhak diberi gelar ulama-ulama perempuan dengan keterlibatan mereka dalam pengembangan wacana sosial-keagamaan dan sosial-intelektual Islam.

Sebagaimana Jajat Burhanudin yang memperluas klasifikasi ulama bagi perempuan sesuai dengan kegiatan yang dikonsentrasikan oleh para perempuan. Seperti pendidikan, dakwah, politik, sosial-kemasyarakatan, tasawuf, dan bidang-bidang lain yang menjadi orientasi dan garapan keulamaan mereka.¹³

Kemudian menurut KUPI (kongres ulama perempuan Indonesia) menyepakati penggunaan istilah “ulama perempuan” dibanding “perempuan ulama” istilah “ulama perempuan” lebih bersifat ideologis, muncul untuk

¹³Jajat Burhanudin, ed. Ulama Perempuan ..., h. x.

merespon persoalan peminggiran perempuan pada umumnya dan perempuan yang memiliki kualitas keulamaan pada khususnya.¹⁴

Dalam hal ini karena para ulama perempuan pondok pesantren ini memiliki visi-misi memberdayakan dan memajukan para perempuan dengan ilmu keagamaan, maka hal ini juga salah satu respon mereka untuk menghilangkan persoalan peminggiran perempuan.

Kemudian Husein Muhammad juga memaparkan tentang tugas-tugas utama ulama perempuan, diantaranya: Bersama laki-laki mengembangkan interpretasi dua sumber agama Islam untuk menghasilkan fatwa-fatwa, menegakkan keadilan, menghapus beranekaragam diskriminasi, serta aktif dalam menyuarakan toleransi, moderasi, dan anti kekerasan.¹⁵

Para ulama perempuan di pondok pesantren ini bersama dengan para kyai yang ada di pondok pesantren tersebut menjalankan misi keulamaannya sesuai dengan fungsinya. Kaum perempuan lebih nyaman jika pengajian dipimpin oleh para ulama perempuan, begitu juga dengan laki-laki juga lebih nyaman jika pengajian mereka dipimpin oleh ulama laki-laki. Begitu juga untuk para santriwati di pondok pesantren puteri yang lebih tepat diajarkan dan dibimbing oleh para perempuan/ustadzah.

Orientasi dan garapan keulamaan perempuan di pondok pesantren puteri ini adalah melalui penguasaan kitab-kitab keagamaan dan mengajarkannya kepada para santri puteri yang ada di pondok pesantren. Selain itu mereka juga mengajarkannya di luar lingkungan pondok pesantren, seperti kepada para jamaah

¹⁴ Helmi Ali Yafie, ed. *Jejak Perjuangan Keulamaan...*, h. xxxi.

¹⁵ Husein Muhammad, *Perempuan Ulama...*, h. 18.

baik ketika menyampaikan ceramah keagamaan, pengajian, maupun majelis taklim.

Diantara para perempuan tersebut adalah: Ibu Hj. Ruminah Saberan dari Pondok Pesantren Rakha Amuntai, beliau dikenal dengan perempuan pencetak hafizh-hafizhah Alquran dan materi ajar yang sering diampu beliau adalah diseputar Alquran dan tafsirnya. Di tempat pengajian-pengajian yang beliau pimpin juga mengajarkan Alquran dan tafsirnya.

Kemudian pondok pesantren yang banyak terdapat ulama-ulama perempuan adalah di Pondok Pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru. Salah satunya yang sangat terkenal adalah *almarhumah* Ibu Dr. Hj. Habibah Lc. M.A., beliau adalah pakar di bidang Hukum Islam dan Fiqh Perempuan. Ilmu yang didapat pun langsung berasal dari Universitas Al-Azhar Cairo Mesir, dari jenjang S1, S2, sampai S3. Selain menjadi *mudīrah* dan pengajar kitab keagamaan di pondok pesantren, beliau juga dosen di UIN Antasari Banjarmasin, serta memiliki majelis taklim. Bahkan beliau berhasil mendirikan pondok pesantren tahfizh yaitu pondok pesantren berbasis tahfizh Alqur'an di Banjarmasin.

Jadi garapan keulamaan para perempuan di pondok pesantren yang ada di Kalimantan Selatan ini sangat bervariasi diantaranya adalah pendidikan, dakwah, politik, dan sosial-kemasyarakatan. Walaupun perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah khusus perempuan yang mengajarkan kitab-kitab keagamaan di pondok pesantren puteri, tetapi ternyata kiprah mereka di ranah publik sangat banyak dan variatif, tidak hanya di pondok pesantren. Dan semua perempuan tersebut memiliki kemampuan menguasai kitab-kitab keagamaan yang sering

disebut dengan istilah kitab kuning, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Melayu-Arab.

Jadi, peranan keagamaan perempuan di pondok pesantren ini ternyata merambah sampai ke luar pondok pesantren seperti penceramah dan pemimpin majelis taklim. Peranan publik mereka di luar lingkungan pondok pesantren ini berhasil mereka peroleh juga karena berdasarkan penilaian masyarakat terhadap peranan mereka di pondok pesantren. Ketika masyarakat puas dengan hasil kinerja mereka di pondok pesantren, maka masyarakat menjadi percaya dengan kemampuan mereka dan memberikan kesempatan-kesempatan kepada mereka untuk memperluas peranan tersebut hingga di luar pondok pesantren.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati bahwa peranan akan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.¹⁶

Oleh karena itu ketika para perempuan pondok pesantren puteri ini menjalankan peranannya sebagai guru yang mengajarkan kitab keagamaan di pondok tersebut, masyarakat sendiri yang akan menilai kinerja dan kualitas kemampuan guru perempuan tersebut.

Ketika masyarakat sudah memberikan label “baik” untuk para perempuan tersebut, dalam artian mereka sudah memberikan kepercayaan terhadap para perempuan, telah menerima para perempuan tersebut, dan mengakui kemampuan serta kualitas, maka hasilnya masyarakat itu sendiri yang akan memberikan

¹⁶Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi...*, h. 211

kesempatan-kesempatan atau peluang kepada perempuan untuk memerankan hal-hal yang baru ataupun memperluas cakupan peranan tersebut.

Sebagaimana yang dialami beberapa guru perempuan pondok pesantren puteri yang awalnya hanya berperan sebagai pendidik di lingkungan pondok pesantren puteri. Kemudian seiring berjalannya waktu, lalu masyarakat mulai mengundang untuk ceramah atau sekedar membacakan kitab keagamaan.

Akhirnya masyarakat meminta untuk mendirikan sebuah majelis taklim agar kegelisahan masyarakat terhadap permasalahan di seputar hukum agama atau tata cara beribadah dapat dihilangkan. Selain itu ada juga sebagian para guru perempuan pondok pesantren puteri yang berhasil mendirikan taman pendidikan Alquran, bahkan pondok pesantren.

3. Peranan Perempuan dalam Managerial dan Kepemimpinan

Kepemimpinan (*Leadership*) adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memengaruhi orang lain (pengikut) sehingga orang lain tersebut bertindak-laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut dan mendukung setiap kehendak tersebut.¹⁷ Dalam memimpin, seorang pemimpin harus mempunyai karakter yang baik agar bisa mengayomi pengikutnya serta membawa perubahan terhadap lembaga yang dipimpinnya, agar segala tujuan dapat tercapai dengan maksimal maka pemimpin juga harus memiliki kemampuan managerial/pengelolaan dengan baik, baik itu mengelola keuangan, waktu, pikiran, dan tenaga.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi...*, h. 247-248.

Salah satu arena kepemimpinan perempuan yang lumrah ditemukan di Indonesia adalah pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berpotensi besar dalam memberdayakan perempuan. Sebelum Indonesia merdeka anak-anak perempuan tidak diberikan akses bersekolah. Hanya anak perempuan dari keluarga elit saja yang boleh sekolah, itu pun hanya sampai tingkat dasar, karena mereka akan dinikahkan dini oleh orang tua mereka.

Kemudian pondok pesantren datang sebagai pembuka jalan kaum perempuan untuk mengembangkan diri. Ormas Islam NU sebagai pendiri pondok pesantren juga mulai mendialogkan isu-isu tentang gender di pondok pesantren, seperti membebaskan tumbuh suburnya beberapa lembaga yang fokus pada kajian di seputar persoalan perempuan.¹⁸

Kebutuhan adanya kepemimpinan perempuan yang otonom di pondok pesantren semakin dirasakan sejak pondok pesantren menerima santri-santri perempuan. Bisa jadi nyai menggantikan pucuk kepemimpinan pondok pesantren setelah kyai wafat karena dinilai oleh keluarga beliau memiliki intelektualitas dan spiritualitas yang tinggi, serta kapabilitas untuk memimpin pondok pesantren. Selain itu, tradisi pemisahan pergaulan dan interaksi antara laki-laki dan perempuan juga memberikan andil untuk mengangkat pemimpin perempuan untuk mengatur dan mengurus santri-santri perempuan sebagai kepanjangan dari kebijakan pimpinan yang tertinggi yang dipegang kyai.¹⁹

¹⁸Faiqoh, *Nyai Agen Perubahan...*, h. 127.

¹⁹Ambarwati dan Aida Husna "Manajemen Pesantren Responsif Gender...", h. 453.

Adapun tentang kepemimpinan perempuan, Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, Husein Muhammad, Asghar Ali, dan beberapa ulama kontemporer lainnya memberikan penafsiran lebih luas lagi terhadap ayat 34 dari surah An-Nisa. Para ulama tersebut lebih menitikberatkan pada konteks zaman serta kondisi yang ada. Apabila didapati perempuan lebih mumpuni serta kondisi mendesaknya untuk berkiprah menjadi seorang pemimpin baik itu ranah publik maupun domestik, maka itu bukanlah sebuah pelanggaran baik dari segi agama maupun kaidah negara.²⁰

Kemudian jika dilihat dari konsep substansial tauhid, maka manusia sebagai hamba Allah berhak menjadi khalifah di muka bumi dan berhak menempati kedudukan apapun baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi pengangkatan manusia sebagai khalifah mencakup laki-laki dan perempuan.²¹ Seperti yang terkandung dalam Q.S. Ali Imran/3: 195. Dalam Alquran juga dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan tentang amal perbuatan seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan Q.S. An-Nahl ayat 97.

Selain itu dalam Q.S. Al-Hujarat/49: 13 menjadi dasar persamaan laki-laki dan perempuan, yang membedakan keduanya hanya ketaqwaan. Ayat-ayat tadi sebagai penegas bahwa laki-laki dan perempuan itu sama baik dari aspek nilai kemanusiaan, hak sosial, dan tanggung jawab. Kesimpulannya, kepemimpinan perempuan dalam pandangan Islam itu bukan suatu hal yang dipermasalahkan, tidak ada larangan, bahkan diberi kesempatan untuk menjadi khalifah baik itu perempuan maupun laki-laki.

²⁰Dhurotun Nasicha Aliyatul Himmah & Nurul Yaqien, "Kepemimpinan Perempuan...", h. 145.

²¹Hibbah Rauf Izzat, *Perempuan dan Politik...*, h. 48.

Kebutuhan sosok pemimpin perempuan di pondok pesantren dimulai sejak berdirinya pondok pesantren puteri, tujuannya agar para santriwati yang ada di lingkungan pesantren merasa lebih nyaman ketika kepemimpinan diampu oleh perempuan. Tradisi pemisahan pergaulan dan interaksi antara laki-laki dan perempuan ini memberikan andil untuk mengangkat pemimpin perempuan untuk mengatur dan mengurus santriwati sebagai kepanjangan dari kebijakan pimpinan yang tertinggi yang dipegang oleh kyai.²²

Sifat dan tipe kepemimpinan perempuan sangat mempengaruhi dalam proses menjalankan posisi sebagai pemimpin/penguasa, karena sosok pemimpin harus memiliki kemampuan mempengaruhi dengan berbagai macam strategi. Peneliti telah memaparkan sosok pemimpin perempuan di bab 4, yaitu Ibu Hj. Siti Aminah di pondok pesantren puteri Rasyidiyah Khalidiyah.

a. Strategi dalam Kepemimpinan Perempuan di Pondok Pesantren Puteri

Untuk melancarkan pengaruhnya para pemimpin perempuan di pesantren puteri ini sama-sama menggunakan pendekatan persahabatan/kekerabatan dan komunikasi karena mereka perempuan dan lingkungan yang dipengaruhi juga mayoritasnya perempuan jadi sebagaimana sifat dasar perempuan yaitu lemah lembut, membujuk tanpa ada paksaan, namun perlu dikomunikasikan sampai pengikut bersedia dengan sendirinya menuruti kehendak mereka.

²²Ambarwati dan Aida Husna "Manajemen Pesantren Responsif Gender...", h. 453.

Seperti bersedia melakukan pendekatan dengan cara mendatangi salah satu rumah santriwati alumni pondok pesantren dengan tujuan membujuk dan meminta kesediaannya untuk ikut mengajar di pondok pesantren. Dengan teknik mendekati dan mengomunikasikan dengan baik maka santriwatinya itu mau mengajar di pondok pesantren tersebut. Ketika di pondok pesantren kekurangan tenaga pengajar, maka pemimpin tersebut mendatangi teman dan kerabat untuk meminta kesediaannya untuk mengajar di pondok pesantren. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Ibu Hj. Mastika Aini, Kepala Sekolah pertama di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Puteri Amuntai dan Ibu Hj. Siti Ramlah, Lc. MA., *Mudirah* pertama di Pondok Pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru.

Tidak jauh berbeda dengan Ibu Hj. Siti Aminah, sebagai kepala sekolah di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Puteri Amuntai, beliau lebih mengutamakan kerja bersama, saling bantu-membantu dalam pekerjaan, dan tidak memaksakan kehendak. Ketika bekerja pasti ada hak dan kewajiban, namun ketika ada kejadian yang tak terduga yang mengharuskan orang itu tidak bisa melaksanakan kewajibannya makanya bagi bu Hj. Siti Aminah memang ada hak dan kewajiban tetapi tergantung situasi dan kondisi juga.

Para pemimpin perempuan ini menggunakan jenis pengaruh bebas yang didasarkan pada komunikasi dan bersifat persuasif. Sebagaimana yang disebutkan oleh Soerjono yang membagi jenis pengaruh kekuasaan dalam dua macam:

- 1) Pengaruh bebas yang didasarkan pada komunikasi dan bersifat persuasif.
- 2) Pengaruh tidak bebas, pengaruh ini menjadi efektif karena ciri tertentu yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berpengaruh.²³

b. Sifat Kepemimpinan Perempuan di Pondok Pesantren Puteri

Dari fakta lapangan yang di peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa para pemimpin perempuan ini juga menggunakan sifat dan hakikat hubungan persahabatan dan kekerabatan dalam melancarkan pengaruhnya, hal ini disebut dengan sifat dan hakikat kekuasaan yang simetris. Namun ada juga yang menggunakan sifat dan hakikat kekuasaan asimetris yaitu melancarkan pengaruhnya berdasarkan popularitas seperti yang dilakukan oleh Ibu Hj. Siti Ramlah, kebetulan beliau juga punya keahlian dalam berceramah sering diundang masyarakat untuk mengisi ceramah dalam acara keagamaan, dalam ceramahnya beliau tidak lupa melancarkan pengaruhnya untuk menyeru jamaahnya agar memasukkan puteri-puteri mereka ke pesantren yang beliau pimpin.

Sistem kekuasaan yang digunakan oleh kebanyakan pesantren di Indonesia tidak terkecuali yang ada di Kalimantan Selatan ini adalah tipe kekeluargaan/keturunan dalam sistem lapisan kekuasaan/piramida kekuasaan itu termasuk tipe kasta yaitu sistem lapisan kekuasaan yang dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Tetapi yang terjadi pada tiga pemimpin perempuan ini dua dari mereka dapat dipastikan tidak ada kaitan

²³ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi...*, h. 227.

keluarga antara mereka dengan pendiri pesantren, sedangkan satu orang di antara mereka adalah menantu dari pendiri pesantren, yang memungkinkan terpilih menjadi pemimpin.

Menurut fakta yang ada di lapangan bahwa ketiga pemimpin perempuan ini terpilih karena kemampuan mereka yang dianggap pantas memimpin pesantren puteri, seperti dedikasi yang mereka berikan untuk pesantren, latar belakang pendidikan mereka, keilmuan mereka, sampai letak tempat tinggal mereka yang dianggap strategis untuk menjalankan peran mereka sebagai pemimpin.

Sebagaimana Ibu Hj. Mastika Aini, beliau dipilih sebagai pemimpin pesantren puteri Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai karena pada saat itu hanya beliau satu-satunya alumni pesantren yang bertempat tinggal di kota Amuntai/Paliwara. Hal itu mempermudah beliau ketika ada yang perlu diurus karena rumah beliau dekat dengan pesantren dan juga perkantoran.

Maka dari itu tipe lapisan kekuasaan yang digunakan pondok pesantren puteri Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai dan Al-Falah Puteri Banjarbaru ini adalah tipe demokratis, yaitu faktor usaha dan kemampuan yang dimiliki serta juga faktor keberuntunganlah yang membawa individu meraih kedudukan sebagai penguasa/pemimpin.

c. Tipe Kepemimpinan Perempuan di Pondok Pesantren Puteri

Ambarwati dan Aida Husna telah merangkum tipe-tipe kepemimpinan perempuan di pondok pesantren, yaitu: lebih suka menggunakan pendekatan keakraban/persahabatan, lemah-lembut, demokratis, memberikan

kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak langsung diberikan hukuman, lebih perhatian terhadap santriwatinya laksana “ibu” dari anak-anaknya, tipologi interaksi sosial di dalam pondok pesantren yang laksana orang tua dan anak ini menghendaki adanya “ibu bagi para santriwati”, penekanan pada pendidikan afeksi, karena nyai lebih peka terhadap tabiat/tingkah laku yang diperbuat santriwati, sangat teliti, dan lebih artistik.²⁴

Masing-masing pemimpin perempuan ini mempunyai misi penting dalam mengembangkan pesantren perempuan. Seperti Ibu Hj. Siti Aminah yang ingin mendisiplinkan pihak-pihak yang terkait dengan pesantren puteri seperti para guru, karyawan, dan santriwatinya. Mereka juga mempunyai sifat kepemimpinan seperti cepat tanggap mengatasi masalah dan juga pemikir seperti ketika terjadi kekurangan tenaga pengajar, mereka langsung terjun sendiri untuk mencari orang yang bersedia mengajar dan memikirkan sendiri strategi yang digunakan dalam mencari tambahan tenaga pengajar tersebut.

Mereka juga berani mengambil risiko, tegas dalam mengambil keputusan, dan menggunakan kekuasaan secara bijak, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Hj. Siti Ramlah yang berani mengizinkan santriwati untuk pergi ke luar lingkungan pesantren untuk menghadiri undangan acara maulid Nabi Saw., dan menyebarkan syiar Islam lewat syair-syair Maulid Nabi Saw.

²⁴Ambarwati dan Aida Husna “Manajemen Pesantren Responsif Gender ...”, h. 453-454.

Mengizinkan santriwati ke luar pesantren ini mengandung risiko yang tinggi karena bisa saja terjadi sesuatu yang membahayakan terhadap santriwati. Namun beliau pasti sudah memikirkan dengan sangat matang keputusan yang beliau buat. Dan akan mempertanggung jawabkan keputusannya.

Tujuan beliau bagus, yaitu untuk melatih kemandirian santriwati dan melatih agar santriwati memiliki keterampilan dalam mensyiarkan agama Islam, serta melatih santriwati bersosial dengan masyarakat sekitar pesantren. Hal ini juga bisa menarik minat orang tua lain yang datang ke acara itu untuk mendaftarkan anaknya ke pesantren. Dalam hal ini beliau juga menggunakan kekuasaan secara bijak.

Sebagian besar ketiga pemimpin perempuan di atas memiliki segenap karakter/sifat kepemimpinan sebagaimana yang dijelaskan Sheil Murray Bthel dalam Kustadi bahwa ada dua belas karakter/sifat kepemimpinan yaitu; mempunyai misi penting, pemikir besar, mempunyai etika tinggi, menguasai perubahan, peka terhadap situasi di sekitarnya, berani mengambil risiko, tegas dalam mengambil keputusan, menggunakan kekuasaan secara bijaksana, berkomunikasi secara efektif, pembangun suatu tim, pemberani, dan memiliki kometmen.²⁵

Ketika memutuskan sesuatu para pemimpin perempuan ini selalu melibatkan para guru dan karyawan misalkan dengan mengambil suara yang terbanyak jadi tidak memihak atau tidak egois memutuskan sendiri. Hal ini

²⁵Suhandang Kustadi, *Manajemen Pers Dakwa...*, h. 82-83.

mengisyaratkan bahwa model kepemimpinan yang mereka gunakan adalah model kepemimpinan demokratis dan kharismatik.

Dalam tradisi pondok pesantren, kepemimpinan kharismatik muncul dari hubungan transendental seorang Kiai dengan Tuhannya, sehingga mempengaruhi segala sisi kehidupan terutama yang berkaitan dengan religiusitas dan akhlaknya sehari-hari.²⁶ Kekuasaan karismatik kiai (pemimpin) dapat diperoleh melalui kewibawaan yang didapat dari Kemampuan dalam menguasai pengetahuan agama yang disertai moralitas, kepribadian saleh, dan kesetiaan menyantuni masyarakat.²⁷ Dalam hal ini Ibu Hj. Siti Ramlah dan Ibu Dr. Hj. Habibah, Lc., MA. memiliki potensi dalam kekuasaan karismatik karena sesuai dengan kemampuan beliau dalam menguasai pengetahuan agama karena beliau lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, serta sebagai penceramah juga yang menjadi publik figur bagi masyarakat sekitar pesantren dan Banjarmasin.

Sedangkan Pemimpin demokratis memandang peranannya selaku koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi. Proses pengambilan keputusan melibatkan peran bawahan agar mempunyai rasa tanggungjawab yang lebih besar dalam pelaksanaan keputusan yang diambil. Pelanggaran disiplin atau etika disepakati bersama dengan pendekatan korektif dan edukatif, bukan punitif. Pemimpin demokratis biasanya disegani dan dihormati, bukan ditakuti, karena senantiasa

²⁶Zainal Arifin, "Kepemimpinan Kiai dalam...", h. 360.

²⁷ Abdur Rozaki, *Menabur Karisma* ..., h. 87-88.

mendorong bawahan untuk menumbuhkan dan mengembangkan daya inovasi serta kreativitas.²⁸

Para pemimpin perempuan ini memposisikan diri sebagai koordinator/pengarah/pengatur bawahannya bukan sok mengepalai/otoriter. Pengambilan keputusan melibatkan peran bawahan, tujuannya agar mereka mempunyai rasa tanggungjawab yang lebih besar dalam pelaksanaan keputusan yang diambil, karena hasil keputusan sendiri dan juga atas pilihan kehendak sendiri. Jika ada pelanggaran maka hukumannya juga disepakati bersama tidak semau pemimpin. Terlihat juga ketika proses pengambilan keputusan yang mereka gunakan yaitu dengan bermusyawarah terlebih dahulu. Mereka selalu mendorong, mempengaruhi, mengajak, dan menuntun.

Siti Nur Hidayah & Ahmad Arifi menyebutkan bahwa ada tiga jenis peranan perempuan dalam mengelola pondok pesantren. Yaitu *pertama*, seorang perempuan yang memiliki tanggung jawab dan pembagian kerja yang jelas, memiliki wewenang dalam mengelola santri laki-laki dan santri perempuan, *kedua* seorang perempuan yang mengelola santri laki-laki dan santri perempuan namun otoritas tertinggi masih di tangan kyai, *ketiga* seorang perempuan yang memimpin khusus pesantren perempuan dan memegang otoritas, tanggung jawab dan tugas dalam mengembangkan pesantren puteri tersebut.²⁹

²⁸ Sondang P Siagian, *Teori & Praktek...*, h. 40.

²⁹Siti Nur Hidayah & Ahmad Arifi, "Women In Islamic...", h. 148.

Para pemimpin perempuan di pondok pesantren puteri yang ada di Kalimantan Selatan ini menjalankan peranan kepemimpinan tipe yang ketiga yaitu memimpin khusus pesantren perempuan dan memegang otoritas, tanggung jawab dan tugas dalam mengembangkan pondok pesantren puteri tersebut.

Ada dua istilah pemimpin yang digunakan di pondok pesantren yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu *mudir/mudirah* dan kepala sekolah. Yang membedakannya hanya pada cakupan wilayah yang dipimpinnya. *Mudir/mudirah* memimpin jenjang madrasah-madrasah mulai dari Mts sampai MA. Sedangkan kepala sekolah hanya memimpin suatu jenjang pendidikan saja, misalkan kepala sekolah Mts, maka wilayah kepemimpinannya hanya diseputar jenjang Mts saja. Oleh karena itu tipe kepemimpinan perempuan di pondok pesantren puteri di Kalimantan Selatan ini adalah memimpin khusus pondok pesantren perempuan saja.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari sosok pemimpin perempuan di atas adalah bahwa mereka para pemimpin perempuan lebih banyak menjalin komunikasi kepada anggota yang dia pimpin ketika ingin memerintahkan sesuatu. Menjaln keakraban kepada bawahan, menganggap bawahannya ini teman dan sahabat, jadi seakan-akan tidak ada sekat antara atasan dengan bawahan. Walaupun begitu, para bawahannya sangat menghormati mereka sebagai pimpinan mereka. Kebanyakan mereka memimpin dengan demokratis, ditandai dengan sikap kerjasama, musyawarah, dan pendelegasian wewenang, seperti

selalu melibatkan semua unsur dalam pengambilan keputusannya dalam kebijakan.

Selain peranan sebagai pemimpin, ada juga peranan perempuan dalam memanagerial pondok pesantren, yaitu kemampuan hebat managerial para perempuan pondok pesantren ketika mereka mengerjakan peranan sebagai pengasuh asrama dan perumus kurikulum pondok. Dua pekerjaan ini sangatlah memerlukan kepandaian dalam manajemen, seperti mengatur jadwal pengajaran, siapa yang mengajar, apa yang diajarkan, dan apa sumber belajarnya.

Begitu juga dengan pengasuh asrama, bagaimana mengatur para santri mulai dari hal terkecil seperti jadwal mandi, makan, bersih-bersih, sampai hal terbesar seperti pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib asrama. Kemudian waktu tidur malam dan waktu bangun subuh, karena kedisiplinan paling utama yang harus diajarkan di asrama. Dan para pengasuh harus mencerminkan sikap disiplin dan menjadi contoh untuk santrinya.

4. Peranan Perempuan dalam Perekonomian

Peranan perempuan pondok pesantren putri dalam perekonomian pondok pesantren juga tidak kalah pentingnya untuk diuraikan. Sebagai contoh adalah sosok Nyai Nafisah Sahal pemimpin Pesantren Al-Badi'iyah di Kajen. Upaya ke arah perubahan-perubahan telah dilakukan oleh beliau. Dengan segenap ilmu yang beliau miliki, beliau berhasil meningkatkan pendapatan pesantren, bahkan meningkatkan penghasilan pada masyarakat di sekitar pesantren dengan mengembangkan Agro Bisnis.

Pesantren ini bekerja sama dengan perusahaan Kacang Garuda. Dalam kerjasama ini pesantren menjadi agen pemasok kacang tanah sebanyak 1.000 ton tiap tahun yang diambil dari para petani sekitar pesantren yang sudah menjadi anggota Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Selain itu pesantren ini juga mengembangkan *home industry* yang dikembangkan dengan pembuatan emping jagung dan pembuatan tepung tapioka secara tradisional.³⁰

Senada dengan penelitian Siti Mahmudah Noorhayati juga mengangkat pembahasan tentang keterlibatan nyai dalam perekonomian pondok pesantren melalui pemberdayaan perempuan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Di sini Noorhayati menguraikan bahwa peranan nyai di Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo dalam pemberdayaan perempuan terwujud dalam segala aspek, di antaranya dalam aspek sosial seperti sosok Nyai Masruroh yang di kenal sebagai induk penggalangan dana, dengan mengumpulkan para donator beliau berhasil menjadwalkan pembagian dana sosial secara rutin, seperti santunan anak yatim piatu, para janda, orang tua jompo, beasiswa pendidikan dan lain-lain.³¹

Di Kalimantan Selatan, perempuan pondok pesantren tidak ingin ketinggalan ikut berperan dalam bidang perekonomian pondok pesantren. Penggalangan dana dengan *network* yang luas mampu menjembatani keresahan perekonomian yang ada di lingkungan pondok pesantren.

Seperti yang dilakukan para perempuan Pondok Pesantren Rakha Amuntai saat perjalanan ke Samarinda, selain membawa misi berdakwah mereka juga mengadakan penggalangan dana dengan membagikan almanak/kalender Pondok

³⁰ Faiqoh, *Nyai Agen Perubahan...*, h. 195.

³¹ Siti Mahmudah Noorhayati "Keterlibatan Nyai dalam...", h. 120.

Pesantren Rakha Amuntai dan hasilnya untuk dana pembangunan pondok pesantren. Penggalangan dana melalui *safrah amal* dan bahkan di antara mereka ada yang bersedia mengorbankan harta pribadi untuk pembangunan pondok pesantren sebagaimana yang dilakukan oleh ibu Hj. Siti Fatimah istri Tuan Guru Haji Abdurrasyid pendiri Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai.

5. Peranan Perempuan dalam Politik

Politik merupakan salah satu peranan penting yang dimainkan para perempuan Islam di masa awal Islam. Dalam perang misalnya para perempuan hadir di medan perang, terutama untuk merawat orang-orang yang terluka dan membakar semangat kaum pria dengan lagu dan syair, bahkan ada yang terjun ikut berperang seperti Ummu Umarah, serta menjadi panglima dan memimpin perang seperti yang dilakukan Aisyah RA.³²

Adapun maksud peranan politik di sini adalah para perempuan pondok pesantren yang ikut terlibat dalam parlemen politik pemerintahan Indonesia. Tokoh perempuan yang ikut berperan dalam politik adalah *almarhumah* Ibu Hj. Masyithah dari Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai. Sebelumnya beliau hanya mengajarkan kitab-kitab keagamaan di pondok, seperti mengajarkan materi tauhid dengan menggunakan kitab *Kifâyah Al-Mubtadi'in* dan materi fiqh dengan kitab *Fiqh Parukunan* di pondok pesantren.

³²Muhammad ibn Jarir Al-Thabari, *Tarikh al-Umam...*, h. 562.

Selanjutnya kiprah beliau bertambah dan meluas tidak hanya di dalam pondok pesantren tetapi juga di luar pondok, seperti mengisi majelis taklim, penceramah, memimpin acara lelang, serta akhirnya beliau sampai pada suatu peranan yang tidak biasa dimasuki oleh perempuan yaitu ikut terjun dalam bidang politik. Kala itu tahun 1997 belum banyak para perempuan yang berani melakoni peranan sebagai politisi dan tidak tanggung-tanggung, beliau berhasil menjadi anggota DPR dari partai Golkar.

B. Fungsi *Manifes* Perempuan di Pondok Pesantren Puteri

Turner menjelaskan bahwa para pendukung teori struktural fungsional telah bersepakat tentang adanya penetapan dan difrensiasi peranan dalam kehidupan bermasyarakat, jika tidak maka masyarakat tersebut tidak akan hidup.³³ Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh dalam masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat.³⁴

Selanjutnya Wallace dan Alison dalam Wirawan menjelaskan bahwa *functionalist* (para penganut pendekatan fungsional) menganggap masyarakat dan lembaga-lembaga sosial adalah suatu sistem yang seluruh bagiannya saling tergantung satu dengan yang lainnya dan bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan (*equilibrium*).³⁵

³³Bryan S. Turner ed., *Teori Sosial dari Klasik sampai...*, h. 108.

³⁴M. Dimiyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan...*, h. 30.

³⁵I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial...*, h. 42.

Menurut teori struktural fungsional bahwa keharmonisan dan stabilitas suatu masyarakat sangat ditentukan oleh konsensus nilai-nilai. Dalam hal peran gender, penganut teori ini menunjuk masyarakat pra industri sebagai contoh masyarakat tersebut terintegrasi dalam suatu sistem sosial. Walaupun demikian, para pendukung teori ini berpendapat bahwa teori ini tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu dengan yang lain, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Teori ini mencoba menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan suatu keseimbangan dalam suatu masyarakat.³⁶

Karena menurut Durkheim kehidupan sosial di masyarakat pastilah berbeda-beda dan dalam perkembangannya pun tidak begitu cepat. Artinya antara satu individu dengan individu yang lainnya sudah ada bagian-bagian pekerjaan sesuai porsi dan keahlian dalam ranah sosial. Seperti dalam rumah tangga, ada ayah, ibu, dan anak yang masing-masing individu tersebut sudah ada bagian-bagian pekerjaannya yang tidak bisa ditukar.³⁷

Adapun menurut Parsons dalam fenomena teori struktural fungsional adalah tentang keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*, ia mengkaji tentang konsep tindakan sosial rasional. Basis dasar dari teori aksi Parsons ini yaitu apa yang dinamakan unit aksi, yang memiliki empat komponen, yaitu eksistensi aktor, unit aksi yang terlibat tujuan, situasi-kondisi, dan sarana-sarana lainnya, yaitu norma-norma dan nilai-

³⁶ M. Dimiyati Huda, *Rethinking Peran...*, h. 30-31.

³⁷ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial...*, h. 13.

nilai.³⁸Selanjutnya tentang sistem sosial, asumsi dasar teori Parsons tentang sistem sosial ini berpegang teguh pada “fungsi” yakni sekumpulan kegiatan atau aktivitas masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sistem sosial.³⁹

Kemudian Merton dalam teori struktural fungsional membagi fungsi tersebut menjadi dua, yaitu fungsi *manifes* dan fungsi *laten*. Fungsi *manifes* adalah fungsi yang diharapkan, sedangkan fungsi *laten* adalah fungsi yang tidak diharapkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Merton dalam bukunya “*Social Theory and Social Structure*”:

The distinction between manifest and latent functions was devised to preclude the inadvertent confusion, often found in the sociological literature, between conscious motivations for social behavior and its objective consequences.⁴⁰ Our scrutiny of current vocabularies of functional analysis has shown how easily, and how unfortunately, the sociologist may identify motives with functions. It was further indicated that the motive and the function vary independently and that the failure to register this fact in an established terminology has contributed to the unwitting tendency among sociologists to confuse the subjective categories of motivation with the objective categories of function.⁴¹

Jadi fungsi *manifes* yaitu fungsi yang diketahui konsekuensi-konsekuensi objektifnya. Konsekuensi tersebut muncul sebagai bagian dari fungsi tersebut. Misalkan fungsi seorang guru adalah memberikan ilmu kepada anak didik juga mempersiapkan metode, strategi dan media untuk pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Sedangkan fungsi *laten* adalah fungsi

³⁸I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial...*, h. 23-24.

³⁹M. Dimiyati Huda, *Rethinking Peran...*, h. 30.

⁴⁰Robert K. Merton, *Social Theory ...*, h. 114.

⁴¹Robert K. Merton, *Social Theory...*, h. 115.

yang tidak diketahui oleh individu bahwa dia dengan tidak disadarinya telah mengerjakan suatu fungsi tersebut.⁴²

Kesimpulan dari analisis pembahasan di atas bahwa peranan perempuan pondok pesantren puteri yang ada di Kalimantan Selatan sangat jelas terlihat dalam ranah sosial/publik. Di antaranya dalam bidang pendidikan baik secara formal maupun non formal, dalam bidang sosial-ekonomi, keagamaan, politik, sampai peranan mereka dalam kepemimpinan.

Peranan perempuan di pondok pesantren puteri ini dapat dikategorikan ke dalam fungsi *manifes* oleh Merton dalam bukunya "*Social Theory and Social Structure*". Yaitu fungsi yang diharapkan atau disadari, disebut juga dengan fungsi nyata. Fungsi disebut nyata, apabila konsekuensi tersebut disengaja atau diketahui.⁴³

Konsekuensi yang disengaja maksudnya adalah para perempuan tersebut dalam berperan baik menjadi pemimpin maupun pengajar kitab keagamaan di pondok pesantren tersebut sudah mengetahui dengan sadar tujuan yang hendak dicapai, mempersiapkan strategi yang tepat untuk menuju ketercapaian tujuan, serta mengetahui hasil yang akan dicapai.

C. Faktor Penghambat Peranan Perempuan di Pondok Pesantren Puteri

Pembahasan ini akan mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi para perempuan ketika mereka berada di pondok pesantren puteri dan ketika menjalankan peranan. Dan dari pihak/arah mana saja hambatan itu datang. Di sini

⁴² I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial ...*, h. 34-35.

⁴³ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi ...*, h. 141.

peneliti menggunakan teori behavioral Krumboltz yang berasal dari teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura.

Krumboltz menganggap bahwa terdapat dua faktor utama sebagai penentu dalam pengambilan keputusan karir yaitu faktor pribadi (internal) dan lingkungan (eksternal). Kepribadian dan tingkah laku orang itu lebih merupakan hasil belajar daripada pembawaan. Sedangkan faktor lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan kerja, syarat kerja, dan sebagainya.⁴⁴

Winkel dan M.M. Sri Hastuti juga menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan karir. Dalam hal ini mereka mengelompokkan dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti nilai-nilai kehidupan, taraf intelegensi, minat, bakat, sifat/kepribadian, pengetahuan, dan keadaan jasmani. Sedangkan faktor eksternal seperti masyarakat, Status sosial-ekonomi keluarga, pengaruh dari seluruh anggota keluarga besar, pengaruh dari sekolah, dan pergaulan dengan teman sebaya⁴⁵

Sebagaimana teori behaviorial ini, maka faktor yang mempengaruhi perempuan dalam menjalankan peranan di pondok pesantren puteri ada dua yaitu faktor yang berasal dari diri perempuan tersebut yang dinamakan faktor internal. Dan ada juga faktor yang berasal dari luar diri perempuan itu, disebut dengan faktor eksternal, seperti berasal dari pondok pesantren, masyarakat, dan keluarga.

⁴⁴ Munandir, *Program Bimbingan...*, h. 15.

⁴⁵ Winkel W. S. dan Sri Hastuti, *Bimbingan dan Konseling...*, h. 645-655

a. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor penghambat perempuan dalam menjalankan peranan di pondok pesantren yang berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri. Diantaranya adalah:

- 1) Kurangnya kesadaran perempuan untuk melakukan perubahan dalam kehidupan, untuk melakukan pengaktualisasian diri di ranah publik, dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Misalnya berusaha meraih pendidikan setinggi-tingginya karena modal utama untuk terbebas dari ketertindasan adalah pendidikan. Faktanya masih sulit menemukan perempuan yang kualifikasi pendidikannya sampai S2 atau *magester*, apalagi di pelosok desa. Fenomena yang dialami peneliti ketika menjadi mahasiswi S1, dahulu para mahasiswi masih seimbang jumlahnya dengan mahasiswa, namun ketika S2 dan S3 para perempuan/mahasiswi semakin menurun jumlahnya dibanding laki-laki. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa perempuan masih tertinggal. Jadi pada *point* ini menurut Krumbolt hambatanya ada pada kepribadian dan tingkah laku individu itu sendiri, karena dalam hal ini para perempuan sudah merasa cukup dengan pendidikannya tanpa ada usaha untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Winkel dan M.M. Sri Hastusi menyebutkan dalam berkarir itu perlu adanya taraf intelegensi yang tinggi sehingga dapat berkarya dan meraih prestasi. Taraf intelegensi ini adalah standar kemampuan untuk mencapai prestasi, taraf intelegensi ini hanya dapat diperoleh melalui

pendidikan bagi individu yang menghendaki dan menyadari pentingnya perubahan.

- 2) Asumsi oleh kebanyakan dari perempuan itu sendiri bahwa cukuplah laki-laki yang berperan banyak dalam ranah publik, seperti yang menjadi pimpinan yang sudah identik dengan peran laki-laki. Dan cukuplah perempuan ini hanya melaksanakan peran sebagai pendidik saja. Anggapan laki-laki adalah *superior* ini yang mengakibatkan perempuan tidak bisa memanfaatkan peluang/kesempatan yang sebenarnya diberikan oleh pondok pesantren, namun para perempuan tidak berani mengambil kesempatan itu. Alasan lainnya adalah menjadi pemimpin itu berat dan pekerjaan mereka para perempuan ini yang sebagian sudah menjadi ibu rumah tangga juga sudah begitu berat, maka dari itu mereka keberatan ketika diminta menjadi pemimpin pondok pesantren. Dalam hal ini Winkel dan M.M. Sri Hastuti memasukkan hambatan ke dalam faktor internal karena yang menghambat itu meliputi ketiadaan minat-bakat. Jadi sebagian perempuan pondok pesantren puteri tidak memiliki minat-bakat untuk memerankan sebuah peranan seperti pemimpin pondok pesantren. Serta sifat sebagian perempuan yang pasrah dengan keadaan, mengalah dan tidak berani mengambil sebuah keputusan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor penghambat perempuan dalam menjalankan peranannya di pondok pesantren yang bukan berasal dari diri perempuan, tetapi muncul dari luar diri perempuan. Diantaranya adalah:

- 1) Faktor dari kebijakan pondok pesantren, seperti kesempatan untuk memperoleh peranan dan kedudukan perempuan masih dalam kategori terbatas dibanding kesempatan yang diberikan kepada laki-laki. Seperti yang kita ketahui bersama di pondok pesantren khususnya di daerah Kalimantan Selatan, untuk para ustadzah khusus mengajar di pondok pesantren puteri, namun untuk para ustadz diberi kebebasan mengajar di pondok pesantren putera maupun puteri. Fenomena ini menjadi gambaran bahwa kesempatan perempuan masih terbatas. Kemudian kebijakan-kebijakan yang dibuat pondok pesantren di Kalimantan Selatan juga masih memarginalkan perempuan, salah satunya kebijakan dalam memperoleh fasilitas, seperti hak mendapatkan tempat tinggal dinas yang ada di lingkungan pondok pesantren, ini hanya guru dan karyawan laki-laki yang boleh mendapatkannya, pihak pondok pesantren memberi alasan karena laki-laki adalah sebagai penanggung jawab keluarganya, maka harus menjadi prioritas. Selanjutnya hak untuk memutuskan suatu kebijakan oleh perempuan baik itu sebagai pemimpin, pendidik, maupun karyawan masih terbatas dan masih terikat oleh kebijakan yayasan petinggi pondok pesantren. Serta keterlibatan perempuan dalam memutuskan suatu kebijakan di

pondok pesantren memang masih sedikit, kebanyakannya mereka hanya tinggal menjalankan kebijakan yang sudah diputuskan oleh yayasan pondok pesantren. Hal ini yang dimaksud oleh Krumboltz bahwa salah satu faktor penghambat seseorang dalam berkarir itu muncul dari faktor lingkungan yaitu dari lingkungan kerja, syarat kerja, dan sebagainya.

- 2) Faktor dari masyarakat dan keluarga, seperti kepercayaan oleh masyarakat terhadap kemampuan yang dimiliki perempuan dalam menjalankan peranan di pesantren baik itu sebagai pemimpin ataupun pendidik masih belum sepenuhnya, dibanding ketika mereka mempercayai kemampuan kyai yang tidak diragukan oleh mereka lagi. Selanjutnya keluarga pun kadang tidak mendukung sepenuhnya terhadap peranan perempuan di pondok pesantren. Larangan suami kadang juga timbul, anjuran agar sebaiknya di rumah saja fokus menjaga anak dan mengerjakan pekerjaan rumah, hal ini yang tidak bisa perempuan hindari. Winkel dan M.M. Sri Hastusi mengategorikan hal ini dengan penghambat yang muncul dari suatu masyarakat yaitu merupakan sosial-budaya yang terbentuk dan berasal dari individu tersebut. Dan juga disebabkan oleh status sosial-ekonomi keluarga, seperti tingkat pendidikan orang tua, pengaruh dari seluruh anggota keluarga seperti suami yang kadang tidak mendukung istrinya bekerja.